



SEMINAR NASIONAL I

▶ **PERAN ILMU-ILMU SOSIAL
DALAM PEMBANGUNAN
INDONESIA BARU**

Padang, 15-17 Oktober 2014



**UNIVERSITAS
ANDALAS**



Prosiding Seminar Nasional Ke-1

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Peran Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Pembangunan Indonesia Baru

x, 854 halaman, 28 cm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Copyright @2014

ISBN: 978-602-71540-0-1

Penyunting:

Dr. Asrinaldi, M.Si

Drs. Syaiful, M.Si

Muhammad Hidayat, S. Sos, MA

Rendhy Atriadi, S. Kom

Dr. Indraddin, M.Si

Yayuk Lestari Sos. MA

Diterbitkan oleh:

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Alamat:

Kampus Limau Manis, Padang 25163

Telep/Faks. 0751-71266

Website: www.fisip.unand.ac.id



KATA SAMBUTAN DEKAN FISIP UNAND

Pertama saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta seminar Nasional dan selamat atas terbentuknya kepengurusan HIPIIS Provinsi Sumatera Barat Priode 2014-2019 di FISIP UNAND Padang.

FISIP UNAND mendorong acara ilmuwan sosial untuk memikirkan dan mencari solusi yang sedang dihadapi bangsa dan negara ini. Selain itu, dengan berpartisipasi pada perkembangan ilmu-ilmu sosial peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat menjadi kontri nusi terhadap persoalan Indonesia ke depan. Indikator perkembangan tersebut salah satunya adalah dilihat dari kemunculan paradigma, teori, konsep yang digunakan oleh ilmu sosial yang mampu menjelaskan fenomena yang dihadapi masyarakat, sehingga mampu dihimpun menjadi gagasan akademis dan praktisi yang berlatar belakang ilmu-ilmu sosial untuk didiskusikan pada forum seminar nasional FISIP 2014.

Harapan kami dengan diangkatannya acara Seminar Nasional I FISIP tahun 2014 dengan tema “Peran Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan Indonesia Baru” dapat terbentuknya “*kinship relations*” bagi seluruh peserta di tingkat nasional. Terlaksananya acara Seminar Nasional ini diharapkan dapat berlanjut menjadi wadah terbentuknya jejaring kerja antara akademisi di Indonesia, khususnya dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi.

Akhirnya, pimpinan Fakultas mengharapkan kritik dan saran peserta Seminar Nasional tahun 2014, agar pelaksanaan acara Seminar Nasional di tahun depan dapat dilakukan lebih sempurna. Kepada tim panitia seminar yang telah bekerja keras dan semua pihak yang telah membantu kesuksesan acara ini disampaikan terimakasih.

Padang, Oktober 2014

Prof. Dr. rer. soz. Nursyirwan Effendi
NIP.196406241990011002



KATA PENGANTAR KETUA PANITIA

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan hidayahnya sehingga penyusunan buku prosiding Seminar Nasional Ke-1 dengan tema “Peran Ilmu-ilmu Sosial Dalam Pembangunan Indonesia Baru” dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya

Buku prosiding ini merupakan kumpulan artikel peserta seminar nasional yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang telah dipresentasikan di kampus Universitas Andalas, Padang tanggal 15-16 Oktober 2014. Kami menyadari bahwa penyusunan buku prosiding ini tidak akan mungkin dapat diselesaikan tanpa peran dan partisipasi berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, kami dari kepanitiaan ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Werry Dartta Taifur, Rektor Universitas Andalas yang telah memfasilitasi kegiatan seminar nasional ini sehingga dapat dilaksanakan.
2. Bapak/Ibu panitia seminar nasional yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan seminar nasional ini sehingga terselenggara dengan baik.
3. Bapak/Ibu pemakalah yang telah menyumbangkan artikelnya sehingga penyusunan buku prosiding ini dapat terwujud.

Kami berharap buku prosiding ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu-ilmu sosial, terutama sumbangannya untuk pembangunan Indonesia Baru yang lebih baik ke depan.

Kami juga menyadari terbatasnya kemampuan dalam melaksanakan seminar nasional ini. Oleh karenanya, kami memohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan seminar nasional ini. Semoga di tahun hadapan, penyelenggaraan ini akan menjadi lebih baik.

Padang, 15 Oktober 2014

Ketua,

Dr. Indraddin, M.Si

NIP. 196711301999031001

Pengantar Penyunting

Perkembangan ilmu-ilmu sosial yang sangat pesat harus disikapi secara positif karena dapat memberi sumbangan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi dengan kondisi Bangsa Indonesia saat ini yang baru saja melakukan rotasi kepemimpinan nasional dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo. Sepuluh tahun periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah berhasil dilaksanakan dengan baik dengan membawa beberapa perubahan yang berarti bagi kehidupan masyarakat. Ini dapat dilihat dari perkembangan demokrasi yang sudah mengarah kepada arah yang lebih baik. Misalnya, ini dapat dibuktikan dengan terselenggaranya Pemilu tahun 2009 dan tahun 2014 secara damai dan berkeadaban. Memang tidak dinafikan ada beberapa persoalan kecil dalam proses berdemokrasi yang berlangsung tersebut. Namun dengan semangat kebersamaan masalah itu dapat diatasi karena elitnya sudah mulai berpikir bagaimana mendahulukan kepentingan bangsa yang lebih besar. Sementara dari aspek lain, pemerintah juga telah berupaya memberi perhatian pada keterlibatan perempuan dalam politik dan pemerintahan dengan menempatkan dimensi gender sebagai salah satu dasar pembuatan kebijakannya. Memang kalau dilihat dari angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan keterwakilan perempuan di institusi pemerintahan masih jauh dari harapan publik, namun pemerintah sebenarnya sudah memberi landasan yang kokoh untuk pengembangan kebijakannya yang pro gender.

Dari segi keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan pemerintahan juga menjadi catatan yang perlu menjadi perhatian Pemerintahan Joko Widodo. Kebijakan afirmatif pemerintah yang menempatkan perempuan sebagai figur yang harus diberi perhatian dan keistimewaan dalam proses politik sudah dilaksanakan. Namun faktanya, masyarakat masih menganggap perempuan “belum siap” untuk menjadi anuta masyarakat sehingga dukungan terhadap mereka dalam proses politik dan pemerintahan tidak maksimal. Walaupun sebenarnya kebijakan afirmatif ini menjadi paradoks dengan hakikat demokrasi prosedural yang mensyaratkan adanya kontestasi dalam proses politik (Dahl, 1971).

Bangsa Indonesia juga sedang menghadapi masalah sosial dan kemanusiaan yang masih harus ditangani secara serius. Angka kemiskinan yang masih tinggi serta pemerataan hasil-hasil pembangunan sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat golongan ekonomi bawah seperti nelayan, kaum buruh tani, pedagang kaki lima, sopir, tukang ojek dan lain sebagainya masih menjadi kendala bagi kemajuan bangsa ini. Kemiskinan menjadi masalah bagi bangsa Indonesia karena masih kuatnya budaya patron-klien dalam masyarakat sehingga masyarakat sulit lepas dari jeratan kemiskinan. Tidak jarang patron yang berada pada strata yang lebih tinggi kedudukannya dari klien, justru memberikan “perlindungan” yang sebenarnya merugikan klien. Patron, dalam empirisnya, cenderung mengeksploitasi klien untuk kepentingan tertentu (Scott, 1972). Tentu ini menjadi catatan sendiri bagi pemerintahan baru yang baru saja terbentuknya untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Bahkan Bangsa Indonesia terlalu lambat untuk mengidentifikasi apa sebenarnya yang menjadi potensi yang dapat dikembangkan selama ke depan. Fenomena ini dipahami oleh Pemerintahan Joko Widodo dengan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dengan potensi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lautnya yang luas, tentu cita-cita untuk menjadi poros maritim dunia bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan.

Dari bidang sosial dan budaya, Indonesia juga memiliki masalah terkait dengan jati diri bangsa yang sudah mulai tergerus dengan masuknya nilai-nilai global. Ideologi Pancasila tidak lagi menjadi anutan generasi muda karena elitnya gagal memberikan teladandalam bersikap dan bertingkah laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Bahkan di khawatirkan, kedepan, krisis ideologi menjadi tantangan serius bagi Pemerintahan “Jokowi” ini. Kecenderungan menguatnya fenomena transnasional dan

multikulturalisme menjadi masalah besar dalam masyarakat di tengah tuntutan masyarakat untuk mengurangi peran negara dalam aktivitas masyarakat. Ini adalah implikasi kuatnya gagasan tentang pluralisme dalam masyarakat yang sadar atau tidak sebenarnya mengancam eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara yang harus dipertahankan.

Selama ini, pemerintah daerah juga belum maksimal kalau tidak mau dikatakan gagal dalam meningkatkan kapabilitasnya memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Umumnya pemerintah daerah belum bisa mengembangkan *e-government* dengan basis kemajuan teknologi komunikasi dan informasi tersebut. Jika dilihat perkembangan *e-government* yang dilaksanakan di daerah, maka yang baru dapat dilaksanakan oleh pemerintah hanyalah pada tahapan awal saja, yaitu *web presence* ketimbang melaksanakan *e-democracy* sebagai tahapan tertinggi. Tingkatan *web presence* adalah tingkatan terendah dari sebuah tahapan perkembangan *e-government* yang dilakukan pemerintah, yaitu dengan menyediakan informasi di situs pemerintah *per se* untuk diinformasikan ke publik (Siau & Long, 2005).

Banyak isu-isu yang berkembang dalam masyarakat inilah yang mendorong ilmuwan sosial untuk membahas dan menganalisisnya sebagai bentuk tanggung jawab moral mereka membangun Indonesia yang lebih baik. Ilmuwan sosial yang peduli dengan keadaan ini mencoba mencari penyelesaian masalah tersebut dengan mengendepankan dialektika gagasan dan fakta yang ada. Ini sesungguhnya bagian kepedulian mereka terhadap pembangunan Indonesia di bawah kepemimpinan "Jokowi-JK". Paling tidak, apa yang sudah diperbincangkan dan dibahas dalam seminar nasional menjadi awal yang baik untuk membantu Pemerintahan Joko Widodo mewujudkan tujuan pembangunan di era pemerintahan baru ini.

Daftar Pustaka

- Dahl, R. 1989. *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press
- Siau, K. & Long, Y. 2005. Synthesizing e-government stage model—a meta-synthesis based meta-ethnography approach. *Industrial Management & Data System*, 105(4):443-458.
- Scott, J. C., 1972. Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia, *American Political Science Review*, 66(71): 91-113

Daftar Isi

Kata Pengantar Dekan.....	ii
Kata Pengantar Ketua Panitia	iii
Pengantar Penyunting	iv
Makalah	
Bidang Politik	10
Desain struktur organisasi Pemerintahan Daerah yang efektif sebagai upaya menghindari mal administrasi dalam tubuh birokrasi Oleh Desna Aromatika (Fisip Universitas Andalas).....	11-16
PNS Berada Di Persimpangan Menegakkan Aturan Atau Aturan Atas Nama Atasan Oleh Afrinaldy Rustam (UIN Riau).....	17-28
Peran Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Terhadap Pelayanan Publik Oleh Suci Yuzana Andriani (Fisip Universitas Andalas).....	29-38
A'pa Alliri: Kepemimpinan Lokal Di Matajang Oleh Syamsul Bahri, Harifuddin Halim, Muhammad Masdar dan Rosmawati (Univ. Tadulako, STKIP Cokroaminoto, Univ 45 Makasar	39-48
Konstelasi Politik Lokal Pasca Pemilihan Presiden 2014 Dan Dampaknya Terhadap Konsolidasi Demokrasi di Sumatera Barat Oleh Asrinaldi (Fisip Universitas Andalas).....	49-59
Gerakan Sosial Sayap Politik PKS di Universitas Andalas Oleh Arifki (Fisip Universitas Andalas)	60-68
Broker dan Distribusi Politik dalam Pemilu Legislatif 2014 Oleh Irawati (Fisip Universitas Andalas)	69-77
Kewajiban Negara Dalam Pemenuhan Hak-Hak Dasar Rakyat Oleh Akmal (FIS Universitas Negeri Padang).....	78-101
Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Indonesia di Parlemen Oleh Audra Jovani (Universitas Kristen Indonesia)	102-111
Kiprah Perempuan Dalam Lembaga Legislatif (Sebuah Studi Tentang Partisipasi Perempuan Anggota DPRD Riau Periode 2009-2014) Oleh Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si (UIN Sultan Syarif Kasim Riau).....	112-130

Keterpurukan Perempuan Dalam Kasus Korupsi Hias Media Massa Oleh Riri Yanti Zahrul (Fisip Universitas Andalas).....	131-142
Motivasi Politik Kepala Desa Perempuan Di Provinsi Jawa Timur Oleh Andri Rusta, Jendrius, Putri Gemala Sari (Fisip Universitas Andalas)	143-152
Representasi Kepemimpinan Perempuan Minang Di Pemerintahan Lokal Oleh Fatmariza (FIS Universitas Negeri Padang)	153-165
Menuju Pemilu Yang Demokratis Oleh Suryanef dan Al Rafni (FIS Universitas Negeri Padang)	166-174
Identifikasi Partisipasi Politik Ulama Tarekat Syathariyah Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009 Oleh Sadri Chaniago, M Soc. Sc (Fisip Universitas Andalas)	175-187
Persepsi Masyarakat Padang pada Debat Politik Capres Dalam Komunikasi Politik Pilpres 2014 di Televisi Nasional Oleh Elva Ronaning Roem (Fisip Universitas Andalas).....	188-215
Pola Kampanye Melalui Media Dan Tingkat Partisipasi Politik Oleh Kusuma Dewi (Fisip Universitas Andalas).....	216-229
Analisis Media, Partai Politik, dan DPR pada Pemilu 2014 Oleh Riswandi (Universitas Mercu Buana)	230-295
Bidang Pengentasan Kemiskinan	296
Menemu-Kenali Perangkap Kemiskinan Nelayan Oleh Ansar Arifin (Universitas Hasanuddin), Haslinda B Anriani dan Musta'inah (Univ. Tadulako), Rasyidah Zainuddin Univ 45 Makasar)	297-306
Efektifitas SKIM Program Pengentasan Kemiskinan di Kampung Jua, Kota Padang Oleh Rinaldi Ekaputra, Machdaliza, Indraddin dan Ardi Abas (Fisip Universitas Andalas)	306-321
Peran Website Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia oleh Yovi Fransiska (Fisip Universitas Andalas).....	322-331
Dilema Pembangunan Karakter Desa dan Kemiskinan (Studi Pembangunan Karakter Pedesaan Muslim yang Memperoleh Bantuan Dana Pengentasan kemiskinan di Kanagarian pariangan Batusangkar Oleh Muhammad Hidayat, Hidayati .N (STAI Al-Hikmah Pariangan Batusangkar).....	332-359

Transparansi Informasi	360
Transparansi Informasi Melalui Website Pemerintah Oleh Neneng Nurlela (Fisip Universitas Andalas)	361-417
Efektivitas Komunikasi Humas Melalui Media Sosial Oleh Multia Qairanni (Fisip Universitas Andalas).....	418-431
Transparansi Informasi Internal Melalui Website e-Government (Studi Kasus di Pemko Padang Panjang Oleh Maryulis (Fisip Universitas Andalas)	432-445
Efektivitas Facebook Sebagai Media Komunikasi Dua Arah Dalam Membentuk Citra Pemerintahan (Studi Pada Media Sosial facebook Humas & Protokol Kota Padang) Oleh Yeni Rizal (Fisip Universitas Andalas).....	446-456
Mewujudkan Transparansi Informasi Melalui Pengelolaan Komunikasi Humas Pemerintah Oleh Neni Yuniarti (Fisip Universitas Andalas)	457-466
Pemanfaatan Media Sosial Facebook Oleh Humas Pemko Padang Dalam Diseminasi Informasi Program Pemerintah Oleh Eka Perwita Sari (Fisip Universitas Andalas)	467-489
Aspek Penting Humas Di Era Keterbukaan Informasi Publik Oleh Lili Susanti (Fisip Universitas Andalas)	490-496
Multikultural	497
Kerangka Agung Dan Konsep Multikultural Oleh Rois Leonard Arios (Fisip Universitas Andalas)	498-507
Dari Tradisi Ke Festival Siti Nurbaya (Studi Kasus Tradisi Malamang di Kota Padang) Oleh Zulfa dan Kaksim (STKIP PGRI Sumatera Barat)	508-523
Kepuasan Cinta Warna-Warni Kontestasi Pluralisme Hukum Oleh M Rawa El Amady (P A D I Institute)	524-531
Pemertanian Multikultural Dalam Sosio Budaya Minangkabau (Ditinjau dari Perspektif Multikultural Kritis) Oleh Isnarmi Moeis (FIS Universitas Negeri Padang).....	532-540
Kewarganegaraan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Oleh Sri Narti (Fisip Universitas Andalas)	541-549
Budaya Pasar Tradisional dan Perubahan gaya hidup masyarakat pedesaan di Sumatera Barat Oleh Nasyirwan Effendi (Fisip Universitas Andalas).....	550-568

Transnasionalisme	569
Arah Politik Luar Negeri Indonesia 2014-2019: Menuju Poros Maritim Dunia Oleh Anita Afriani Sinulingga (Fisip Universitas Andalas)	570-578
Masyarakat Sipil Transnasional Dan Demokratisasi Di Indonesia Oleh Virtuous Setyaka dan Febryna Mulya Forum INDERA	579-590
Penguatan Ideologi Pancasila sebagai Modal Membangun Indonesia Baru Oleh Hendar Putranto (Universitas Multimedia).....	591-609
Strategi Marketing Public Relations PT Garuda Indonesia pada Program GFF (Garuda Frequent Flyer) Oleh Shitta Afrinadia dan Refika Mastanora (Fisip Universitas Andalas).....	610-617
Pemerintahan Lokal	618
Model Pemberdayaan Institusi Lokal dalam Pemanfaatan Remitan Migran Internasional Asal Sumatera Barat Oleh Indraddin (Fisip Universitas Andalas).....	619-636
Tata Kelola Penanggulangan Bencana Alam (Suatu Deskripsi Inter-Relasidan Kesiapan Para Pihak dalam rangka Rehabilitasi-Rekonstruksi Rumah Warga Terdampak Pascagempa di Kabupaten Tanah Datar) Oleh Edi Indrizal (Fisip Universitas Andalas)	637-657
Revitalisasi Peran Tradisional Penduduk Lansia Dalam Keluarga Dan Komunitas Di Daerah Rawan Bencana Oleh Pawennari Hijjang (Universitas Hasanuddin) dan Ummanah (STIA ALAZKA).....	658-668
Efektivitas Komunikasi Humas Melalui Media Sosial Oleh Multia Qairanni (Fisip Universitas Andalas).....	669-682
Analisa Game Theory Politik Lokal Dana Perimbangan Propinsi Jawa Barat Oleh Tamrin (Fisip Universitas Andalas).....	683-694
Civil Sociality	695
Warung Tenda Payung Ceper (Analisis Sosiologi Perilaku Menyimpang di Pantai Padang) Oleh Wahyu Pramono dan Machdaliza (Fisip Universitas Andalas)	696-721
Kontestasi Ruang Ekonomi Kota : Studi Konflik Perebutan Ruang Ekonomi di Pasar Raya Padang Oleh Firdaus (STKIP PGRI Sumatera Barat).....	722-729
Ketidaksinambungan Program Millenium Development Goals di Pemerintahan kota Padang Oleh Amelia Arnis dan Vioni Fauzia (Fisip Universitas Andalas).....	730-737

Media Yang Efektif Dalam Mensosialisasikan PNPM Mandiri Kecamatan Kota Argamakmur Oleh Vethy Octaviani (Fisip Universitas Andalas)	738-746
Dinamika Kelompok, Kepemimpinan Dan Masalah Kelompok Menuju Kemandirian Petani: Kasus kelompok tani di sentra-sentra kakao di Kabupaten Padang Pariaman Oleh Asmawi, Rahmi Surya Dewi, Hery Bachrizal Tanjung (Fisip Universitas Andalas) ...	747-761
Pengetahuan Dan Kesadaran Perempuan Tentang Resiko Keguguran Dan Aborsi Yang Tidak Aman Oleh Sri Meiyenti dan Yunarti (Fisip Universitas Andalas).....	762-777
Penyesuaian Kembali (Readjustment) Peran Dan Hubungan Sosial Pasangan Yang Bercerai Oleh Fachrina dan Nini Anggraini (Fisip Universitas Andalas)	778-788
Badan Pemberdayaan Keluarga Indonesia (BPKI) (Gagasan untuk pemerintah Jokowi-JK tentang masyarakat/sosial) Oleh Wahyu Gunawan (Fisip Unpad)	789-798
Penyelesaian Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berbasis Nilai-Nilai Sosial Lokal Pada Masyarakat Minangkabau Oleh Dwiyanti Hanandini dan Nini Anggraini (Fisip Universitas Andalas)	799-824
Stagnas Keberdayaan Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar Oleh Syaifullah Cangara (Fisip Universitas Hasanudin).....	825-845
Makanan Sebagai Pembeda Sosial: Suatu Kajian Perubahan Budaya Makan Oleh Yevita Nurti (Fisip Universitas Andalas).....	846-854

Jadwal Acara

**SEMINAR NASIONAL KE -1 FISIP- UNAND
KAMPUS UNAND LIMAU MANIS, PADANG
15-17 OKTOBER 2014**

		Convention Hall	Ruang Sidang Dekanat	Ruang Kuliah Pasca Lt3	Ruang Sidang Sosiologi Lt1	Ruang Sidang Antropologi Lt.1
Rabu/ 15 Oktober 2014	08.00- 10.00	Pembukaan				
	10.00- 12.00	Keynote speaker				
	13.30- 15.30		Paralel A1	Paralel A2	Paralel A3	Paralel A4
	16.00- 18.00		Paralel B1	Paralel B2	Paralel B3	Paralel B4
Kamis/ 16 Oktober 2014	08.00- 10.30		Paralel C1	Paralel C2	Paralel C3	
	11.00- 13.00		Paralel D1	Paralel D2	Paralel D3	
	13.00	Penutupan dan makan siang				

SESI PARALEL

SEMINAR NASIONAL KE -1 FISIP

KAMPUS UNAND LIMAU MANIS, PADANG

15-17 OKTOBER 2014

RUANG SIDANG DEKANAT FISIP

Hari I

Rabu, 15 Oktober 2014

13.30-15.30 Paralel A1

Moderator : Andri Rusta, SIP, MPP

1. Desna Aromatika

“Desain struktur organisasi Pemerintahan Daerah yang efektif sebagai upaya menghindari mal administrasi dalam tubuh birokrasi

2. Afrinaldy Rustam

“PNS Berada Di Persimpangan Menegakkan Aturan Atau Aturan Atas Nama Atasan

3. Suci Yuzana Andriani

“Peran Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Terhadap Pelayanan Publik

4. Syamsul Bahri, Harifuddin Halim, Muhammad Masdar dan Rosmawati

“A’pa Alliri: Kepemimpinan Lokal Di Matajang

5. Asrinaldi

“Konstelasi Politik Lokal Pasca Pemilihan Presiden 2014 Dan Dampaknya Terhadap Konsolidasi Demokrasi di Sumatera Barat”

16:00-18:00 Paralel B1

Moderator : Drs. Syaiful, M.Si

1. Anita Afriani Sinulingga

“Arah Politik Luar Negeri Indonesia 2014-2019: Menuju Poros Maritim Dunia

2. Muhammad Nasir Badu

“Kesiapan Daerah Dalam Menghadapi Asean Community 2015 (Studi Kasus: Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat)

3. Ilham Adelano Azre

“Privatisasi BUMN di Indonesia”

4. Virtuous Setyaka dan Febryna Mulya “Masyarakat Sipil Transnasional Dan Demokratisasi Di Indonesia

5. HendarPutranto

“Penguatan Ideologi Pancasila sebagai Modal Membangun Indonesia Baru”

RUANG KULIAH KOMUNIKASI LT.3

HARI I

Rabu, 15 Oktober 2014

13.30-15.30 Paralel A2

Moderator : Dr. Azwar, M.Si

- 1. Eka Perwita Sari**
“Pemilihan Media Sosial Facebook Oleh Humas Pemko Padang Dalam Diseminasi Informasi Program Pemerintah
- 2. Eriansyah**
“Peran Media dalam Pendidikan Politik di Indonesia
- 3. Zainul Ikhwan**
“Potret Penyiaran di Perbatasan Provinsi Riau; Ancaman Politik dan Ekonomi Yang Tidak Dikhawatirkan
- 4. Lili Susanti**
“Arti Penting Humas Di Era Keterbukaan Informasi Publik
- 5. Sri Narti**
“Kewarganegaraan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik”

16.00-18.00 Paralel B2

Moderator: Dr. Elfitra. M.Si

- 1. AnsarArifin, Haslinda B Anriani, Musta'inah dan Rasyidah Zainuddin** “Menemu-Kenali Perangkap Kemiskinan Nelayan”
- 2. RinaldiEka Putra** “Efektifitas SKIM Program Pengentasan Kemiskinan di KampungJua, Kota Padang”
- 3. Vieronica Varbi Sununianti** “Pembangunan dan Tenaga Kerja: (Rezim Pasar Kerja Fleksibel dan Pengentasan Kemiskinan)”
- 4. Yovi Fransiska** “Peran Website Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia”

RUANG SIDANG SOSIOLOGI LT. 1

HARI I

Rabu, 15 Oktober 2014

13.30-15.30Paralel A3

Moderator : Drs. Yoserizal, M.Si

- 1. Shitta Afrinadia**
“Strategi Marketing Public Relations PT Garuda Indonesia pada Program GFF (Garuda Frequent Flyer)
- 2. Syaifullah Cangara**
“Stagnasi Keberdayaan Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar

3. Tamrin

“Analisa Game Theory Politik Lokal Dana Perimbangan Propinsi Jawa Barat

4. Nusyirwan Effendi

“Budaya Pasar Tradisional dan Perubahan gaya hidup masyarakat pedesaan di Sumatera Barat

16.00-18.00 Paralel B3

Moderator : Malse Yulivestra, S.Sos, M.Si

1. Rois Leonard Arios

“Rama Agung Dan Konsep Multikultural

2. Zulfa dan Kaksim

“Dari Tradisi Ke Festival Siti Nurbaya (Studi Kasus Tradisi Malamang di Kota Padang)

3. Rahmi Surya Dewi, M.Si

”Konsep diri Mahasiswa Korean Lovers di Kota Padang”

4. Yevita Nurti

“Makanan Sebagai Pembeda Sosial: Suatu kajian Perubahan Sosial Budaya”

5. M Rawa El Amady

“Kejutan Cinta Warna-Warni Kontestasi Pluralisme Hukum

RUANG SIDANG ANTROPOLOGI LT.1

HARI I

Rabu, 15 Oktober 2014

13.30- 15.30 Paralel A4

Moderator: Dr. Zainal Arifin

1. Arifki

Gerakan Sosial Sayap Politik PKS di Universitas Andalas”

2. Irawati

“Broker dan Distribusi Politik dalam Pemilu Legislatif 2014

3. Rakhmat Hidayat

“Pendidikan Multikulturalisme dalam Perspektif KeIndonesiaan

4. Akmal

“Kewajiban Negara Dalam Pemenuhan Hak-Hak Dasar Rakyat

5. Tantri Puspita Yazid

“*Cyber Public Relations*: Masa Depan Pelayanan Publik di Indonesia”

16.00- 18.00 Paralel B4

Moderator: Dr. Maihasni

1. **Wahyu Pramono dan Machdaliza** “Warung Tenda Payung Ceper (Analisis Sosiologi Perilaku Menyimpang di Pantai Padang)”
2. **Firdaus** “Kontestasi Ruang Ekonomi Kota: Studi Konflik Perebutan Ruang Ekonomi di Pasar Raya Padang”
3. **Yeni Rizal** “Pembentukan Opini Publik Melalui Facebook Dalam Membentuk Citra Pemerintah
4. **Amelia Arnis dan Vioni Fauzia** “Ketidaksinambungan Program Millenium Development Goals di Pemerintahankota Padang”
5. **Pawennari Hijjang**
“Revitalisasi Peran Tradisional Penduduk Lansia dalam Keluarga dan Komunitas di Daerah Rawan Bencana “

RUANG SIDANG DEKANAT FISIP

HARI KE II

Kamis, 16 Oktober 2014

08:30-10:30 Paralel C1

Moderator : Anita Sinulingga, SIP, M.Si

1. **Audra Jovani**
“Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Indonesia di Parlemen”
2. **Mustiqowati Ummul Fithriyyah**
“Kiprah Perempuan Dalam Lembaga Legislatif (Sebuah Studi Tentang Partisipasi Perempuan Anggota DPRD Riau Periode 2009-2014)”
3. **RiriYantiZahrul**
“Keterpurukan Perempuan Dalam Kasus Korupsi Hias Media Massa”
4. **Andri Rusta**
“Motivasi Politik Kepala Desa Perempuan Di Provinsi Jawa Timur”
5. **Fatmariza**
“Representasi Kepemimpinan Perempuan Minang Di Pemerintahan Lokal”

11:00-13:00 Paralel D1

Moderator: Drs.Tamrin, M.Si

1. **Suryanef dan Ai Refni**
“Menuju Pemilu Yang Demokratis
2. **Sadri**
“Identifikasi Partisipasi Politik Ulama Tarekat Syathariyah Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009”
3. **Elva RonaningRoem**
“Persepsi Masyarakat Padang pada Debat Politik Capres Dalam Komunikasi Politik Pilpres 2014 Di Televis Nasional”
4. **Kusuma Dewi**

- “Pola Kampanye Melalui Media Dan Tingkat Partisipasi Politik”
5. **Riswandi**
“Analisis Media, Partai Politik, dan DPR pada Pemilu 2014”

RUANG SIDANG SOSIOLOGI LT.1

HARI KEII

Kamis, 16 Oktober 2014

08.30-10.30 Paralel C3

Moderator : Dr.Asmawi, M.Si

1. **Vethy Octaviani**
“Media Yang Efektif Dalam Mensosialisasikan PNPM Mandiri Kecamatan Kota Argamakmur”
2. **Asmawi,Rahmi Surya Dewi,Hery Bachrizal Tanjung**
“Dinamika Kelompok, Kepemimpinan Dan Masalah Kelompok Menuju Kemandirian Petani: Kasus kelompok tani di sentra-sentra kakao di Kabupaten Padang Pariaman”
3. **Silvia Devi**
“Rumah Gadang Sebagai Ketahanan Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau”
4. **Yeni Rizal dan MultiaQairanni**
“Humas Dalam Mengelola Opini Publik yang Berkembang di Media (Studi kasus adanya isumisi kristenisasi dibalik investasi Lippo Group Di Kota Padang)”

11.00-13.00 Paralel D3

Moderator : Lucky Zamzami, SIP, M.Soc.Sc

1. **Sri Meiyenti dan Yunarti**
“Pengetahuan dan Kesadaran Perempuan Tentang Resiko Keguguran Dan Aborsi Yang Tidak Aman”
2. **Fachrina**
“Penyesuaian Kembali (*Readjustment*) Peran Dan Hubungan Sosial Pasangan Yang Berceraai”
3. **Wahyu Gunawan**
“Badan Pemberdayaan Keluarga Indonesia (BPKI) (Gagasan untuk pemerintah Jokowi-JK tentang masyarakat/sosial)”
4. **Isnarmi Moeis**
“Potensi Multikultural Dalam Sosio Budaya Minangkabau (Ditinjau dari Perspektif Multikultural Kritis)”
5. **Dwiyanti Hanandini dan Nini Anggraini**
“Penyelesaian Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berbasis Nilai-Nilai Sosial Lokal Pada Masyarakat Minangkabau”



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas

Sertifikat



SEMINAR NASIONAL KE-1
PERAN ILMU-ILMU SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN
INDONESIA BARU

Diberikan Kepada

Mustiqowati Ummul Fitriyyah, M. Si

Sebagai : PEMAKALAH

SEMINAR NASIONAL KE-1 FISIP UNAND
PERAN ILMU-ILMU SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN
INDONESIA BARU

Padang, 15-17 Oktober 2014



Bekas

Prof. Dr. rer. Soz. Nuisyirwan Effendi

Ketua Panitia

Dr. Indraddin, S. Sos, M. Si

KIPRAH PEREMPUAN DALAM LEMBAGA LEGISLATIF (Sebuah Studi Tentang Partisipasi Perempuan Anggota DPRD Riau Periode 2009-2014)

Oleh: Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si.

Dosen Jurusan Administrasi Negara,
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Email : mustiqoumulfitria@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian mengenai Partisipasi Perempuan Anggota DPRD Riau Periode 2009-2014 memang sangat menarik, mengingat setidaknya dua hal. *Pertama*, Pola rekrutmen anggota dewan yang selama ini berjalan terkesan tidak berbasis kompetensi tetapi loyalitas semu. *Kedua*, Dari sisi persyaratan, Undang Undang yang saat ini masih berlaku hanya mensyaratkan minimal berpendidikan SLTA atau sederajat. Ini jelas, terlalu na'if kalau hanya lulusan SLTA, mengingat seorang dewan, duduk di kursi empuk, konon katanya wakil rakyat, berkantor di lembaga terhormat, mempunyai tugas berat sebagai penyambung lidah rakyat.

Keberadaan DPR/DPRD perlu mendapat dukungan secara penuh oleh semua pihak, terutama partisipasi aktif dari anggota parlemen perempuan, agar tugas dan fungsi lembaga perwakilan tersebut menjadi maksimal. Terlebih saat ini, undang-undang mewajibkan komposisi keanggotaan DPR/DPRD sebanyak 30 % dari total anggota dewan harus mewakili kaum perempuan. Hal ini dimaksudkan agar produk yang dihasilkan anggota dewan tidak bias gender, atau setidaknya produk yang dihasilkan mampu merefleksikan aspirasi kaum perempuan yang selama ini kurang mendapat porsi yang cukup dari sisi keterwakilan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa tingkat partisipasi anggota perempuan di DPRD Riau Periode 2009 – 2014, khususnya yang terkait legislasi dan budgeting bagi kegiatan perempuan di Riau "sangat rendah", sehingga tidak mengherankan jika selama ini eksistensi perempuan di Riau cenderung monoton alias tidak berkembang. Dari sisi kinerja, kualitas dan kapabilitas wakil rakyat dari pusat sampai daerah, masih jauh dari harapan masyarakat dan kepentingan kaum perempuan di Riau belum terakomodir secara maksimal dalam Perda.

Kata Kunci: *Perempuan, lembaga legislatif, legislasi, budgeting, perspektif gender*

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sepanjang tahun 2002, isu gender juga mendapatkan perhatian yang luas dalam perdebatan politik di Indonesia menjelang Pemilu tahun 2004. Masalah-masalah seperti, penerapan kuota untuk perempuan diberbagai tingkatan dan berbagai lembaga politik, masalah dampak sistim pemilu untuk perempuan serta implikasi peningkatan keterwakilan perempuan bagi partai politik menjadi isu penting yang banyak didiskusikan. Krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997 telah banyak mempengaruhi kehidupan kaum perempuan dan anak-anak. Akibat krisis itu antara lain adalah

tingginya angka kematian ibu dan bayi, memburuknya kondisi kesehatan anak-anak, meningkatnya arus pekerja migran perempuan (TKW), meningkatnya angka drop-out sekolah dan angka pengangguran. Dampak-dampak buruk itu telah meningkatkan kesadaran tentang perlunya menyusun sebuah agenda politik yang lebih peka jender (*gender sensitive*). Kehadiran kaum perempuan dalam dunia politik merupakan prasyarat bagi terwujudnya masyarakat yang memiliki kesetaraan jender.

Berikut adalah gambaran sejarah keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia:

Tabel 1:
Data Keterwakilan Perempuan Indonesia di DPR RI¹

Periode	Jumlah Perempuan	Jumlah Laki-laki
1950 – 1955 (DPR Sementara)	9 (3,8%)	236 (96,2%)
1955 – 1960	17 (6,3%)	272 (93,7%)
Konstituante 1956 – 1959	25 (5,1 %)	488 (94,9%)
1971-1977	36 (7,8%)	460 (92,2%)
1977 – 1982	29 (6,3%)	460 (93,7%)
1982 – 1987	39 (8,5%)	460 (91,5%)
1987 – 1992	65 (13%)	500 (87%)
1992 – 1997	62 (12,5%)	500 (87,5%)
1999 – 2004	46 (9%)	500 (91%)
2004 – 2009	63(11,8%)	487 (88,2%)
2009 – 2014	101 (18%)	459 (82%)

Terkait dengan proses legislasi berbasis gender, terdapat beberapa masalah yang serius yang dihadapi perempuan, karena lahirnya berbagai produk legislasi yang merugikan perempuan.

Permasalahan tersebut **pertama** adalah karena ketiadaan perspektif perempuan di kalangan perumus peraturan perundang-undangan, yang menjauhkan produk legislasi dari pengalaman keseharian perempuan. Hal ini tercermin dari masih adanya 21 peraturan perundang-undangan, yang substansinya merugikan perempuan².

Beberapa contoh di antaranya adalah:

- a. UU Pornografi yang meskipun tujuannya baik, tetapi berbagai perumusan di dalamnya, justru tidak sungguh-sungguh melindungi perempuan dan anak dari ancaman

¹ Data diolah dari berbagai sumber

² Lihat data UNDP, 2007

eksploitasi seksual, melainkan justru mengontrol dan bahkan mengkriminalisasi perempuan (bahkan masyarakat adat);

- b. Dalam ranah hukum keluarga (UU Perkawinan No.1/1974 misalnya terdapat berbagai pasal yang menunjukkan adanya bias gender dan standar ganda.
- c. Dalam ranah hukum pidana, misalnya beberapa rumusan yang menyangkut perkosaan terhadap perempuan dalam KUHP dikategorikan sebagai “kejahatan kesusilaan” (*crime against ethics*) (bab VI, buku III, pasal 532-535), padahal kejahatan seksual terhadap perempuan juga membahayakan nyawa (*crime against person*). Kejahatan seksual terhadap anak, termasuk perkosaan, dikategorikan sebagai percabulan, yang ancaman pidananya lebih ringan jika dibandingkan dengan kejahatan seksual yang korbannya adalah perempuan dewasa (bandingkan Pasal 285,286,287 dan Pasal 294);

Kedua, ketiadaan perspektif perempuan di kalangan perumus peraturan perundang (daerah) termasuk eksekutif daerah, menyebabkan lahirnya berbagai peraturan daerah (PERDA), yang mengabaikan perempuan.

Anggaran yang responsif gender sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan Indonesia, mengingat saat inipun tingkat *Gender Gap Development Index* Indonesia³ masih lebih rendah dibanding beberapa rekan negara lain di Asia. Hal ini dikarenakan antara lain karena rendahnya tingkat pendidikan perempuan, partisipasi dan peluang ekonomi perempuan, kesehatan perempuan dan pemberdayaan politik. Karenanya pemerintah membutuhkan dana yang memadai guna memberdayakan perempuan, termasuk salah satunya adalah untuk membuat program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan. Dan hal tersebut harus didorong dalam lingkaran pembuatan kebijakan anggaran. Pemerintah Daerah perlu juga didorong untuk serius melaksanakan aturan yang terkait dengan APBD. Salah satunya adalah Amanat Presiden No.9/2000 yang menyatakan bahwa idealnya anggaran untuk program yang berperspektif gender adalah 5%. Masalahnya, tidak semua anggota punya perspektif gender budgeting yang memadai.

Hal-hal di atas menjadi tantangan yang besar bagi anggota dewan perempuan di DPRD Riau selanjutnya, dimana selain mengubah cara berpikir patriarkis dan selanjutnya bisa memperjuangkan aspirasi dan kepentingan kaum perempuan serta merespon kebutuhan pemberdayaan perempuan.

³ The Global Gender Gap Index 2009 meletakkan Indonesia dalam peringkat 93 dari 134 negara, disebabkan antara lain tingkat partisipasi dan peluang perempuan di bidang ekonomi yang masih rendah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba meneliti tentang kiprah anggota dewan perempuan DPRD Riau dalam proses pembuatan kebijakan-kebijakan yang berspektif gender. Untuk itu, masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana kiprah perempuan anggota legislatif di DPRD Riau Periode 2009 – 2014”.

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian/survei ini bertujuan untuk melihat kiprah perempuan anggota legislatif pada DPRD Riau.

Secara khusus penelitian/survei ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman anggota legislatif perempuan tentang tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil rakyat.
- b. Untuk mengetahui partisipasi anggota legislatif perempuan dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan, yang berspektif gender.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk :

- a. Sebagai bahan masukan bagi semua pihak,-terutama partai politik dan masyarakat,- dalam menilai tingkat partisipasi para perempuan anggota DPRD Riau Periode 2009 – 2014 dalam konteks memperjuangkan aspirasi masyarakat yang berspektif gender.
- b. Dapat menjadi bahan untuk melakukan pembenahan di internal DP Riau sendiri (*self evaluation*), sehingga ke depan diharapkan bisa lebih maksimal dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, pada umumnya, kaum perempuan pada khususnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

A. Perspektif Gender

Gender adalah struktur sosial dan budaya, yang diciptakan oleh warga masyarakat atau komunitas budaya tertentu, berupa konsep, nilai, ide, nilai, norma, yang dilekatkan kepada

perempuan dan laki-laki yang memiliki ciri biologis yang berbeda. Oleh karena merupakan buatan manusia yang terkait konteks budaya, ruang dan waktu, maka struktur inipun bisa berubah.

Hal yang perlu dipahami adalah keadilan gender merupakan suatu kondisi dan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki. Jadi kesetaraan dan keadilan gender adalah agenda agar perempuan dan laki-laki dapat menikmati status yang sama, berada dalam kondisi hidup dan mendapat kesempatan yang sama untuk merealisasikan potensi dan hak asasinya.

B. Perumusan Legislasi Berperspektif Gender

DPRD Provinsi Riau adalah lembaga yang menjembatani, menaungi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Provinsi Riau, yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) sebagai pegangan untuk dilaksanakan oleh pihak pemerintah.

Lembaga legislatif pada dasarnya memiliki 5 fungsi, yakni :

1. Fungsi Perundang-undangan (Legislation)

Fungsi ini merupakan tugas dan wewenang DPR/DPRD untuk mempersiapkan materi, membahas, memusyawarahkan, memproses suatu aspirasi dan kebutuhan untuk terbentuknya suatu undang-undang.

2. Fungsi Penganggaran (Budgeting)

Fungsi ini merupakan tugas dan wewenang DPR/DPRD untuk mempersiapkan materi, membahas, memusyawarahkan dan memproses suatu aspirasi dan kebutuhan guna terbentuknya sebuah APBN/APBD sebagai acuan pemerintah pusat dan daerah yang dituangkan dalam bentuk Undang Undang. Anggaran ini akan menjadi sumber pembiayaan bagi setiap pelaksanaan program pemerintah.

3. Fungsi Pengawasan (Controlling)

Fungsi ini merupakan tugas dan wewenang DPR/DPRD untuk mengawasi pelaksanaan program pemerintah (pusat dan daerah) yang dibiayai oleh APBN/APBD, dalam hal ini DPR/DPRD dibekali hak angket, hak bertanya dan hak memanggil siapapun untuk dimintai keterangan.

4. Fungsi Keterwakilan (Representation)

Fungsi ini merupakan tugas dan wewenang DPR/DPRD serta pribadi-pribadi anggota DPR/DPRD sebagai pejabat publik dan pejabat politik yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu untuk memperjuangkan, merumuskan, mempersiapkan materi, membahas, memusyawarahkan dan memproses suatu aspirasi dan kebutuhan rakyat sehingga menjadi suatu kebijakan publik dalam bentuk Undang Undang. Dalam hal ini DPR/DPRD wajib melakukan komunikasi intensif dengan rakyat di daerah pemilihannya.

5. Fungsi Pendukung dan Pelengkap Terhadap Kapasitas Kelengkapan DPR/DPRD (Keseekretariatan)

Fungsi ini merupakan tugas dan wewenang kelembagaan keseekretariatan DPR/DPRD untuk memberikan secara optimal, maksimal dan final dalam bentuk dukungan persidangan administrasi keanggotaan, administrasi umum, kelembagaan dan logistik terhadap pelaksanaan seluruh alat-alat kelengkapan DPR/DPRD (Pimpinan DPR/DPRD, komisi-komisi, panitia serta Pansus dakam melaksanakan fungsi dan wewenang DPR/DPRD.

Terkait dengan proses legislasi berbasis gender, ada beberapa alasan mengapa perspektif gender penting dipahami oleh anggota dewan.

Pertama, menyangkut kewenangan dan fungsi anggota parlemen, dalam hal legislasi, penganggaran (*budgeting*) dan pengawasan (*monitoring*). Dari 6 lembaga inilah akan lahir berbagai produk legislasi. Ketiadaan pengetahuan tentang pengalaman hidup perempuan dan kepekaan gender akan melahirkan produk legislasi yang tidak realistis, merugikan, dan bahkan semakin menjauhkan perempuan dari aktualisasi potensi yang ada pada dirinya, yang selanjutnya akan merugikan bangsa.

Kedua, ketiadaan perspektif gender akan melahirkan perancangan anggaran yang tidak adil karena tidak mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan realistis kaum perempuan (anak-anak khususnya dari kelompok miskin). Padahal perempuanlah yang menjadi korban terdepan dalam bidang-bidang yang paling esensial seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, bantuan hukum, dan banyak lagi. Dalam bidang kesehatan misalnya, ternyata alokasi anggaran untuk kesehatan itu pada tahun 2008 kurang dari 1% APBN, dan rata-rata APBD⁴.

⁴ Kompas, 7 Agustus 2009

Ketiga, ketiadaan keterwakilan perempuan secara memadai di parlemen juga akan melahirkan keterbatasan akses bagi kaum perempuan (terutama kelompok miskin), untuk menyuarakan kepentingannya. Keterwakilan perempuan secara memadai sangat penting untuk memastikan bahwa pengalaman hidup perempuan diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan. Kebijakan kuota bagi perempuan di parlemen, hendaknya dipahami sebagai *affirmative action*, dalam rangka mendorong tercapainya pemajuan hak politik perempuan ketika peran perempuan dalam bidang politik masih terbatas. Kebijakan kuota di berbagai negara telah memperlihatkan bahwa keterwakilan perempuan secara memadai di parlemen kuat relevansinya dengan kemajuan bangsa.

Keempat, kondisi hidup warga negara merupakan cerminan dari hasil (*output*). maupun dampak (*outcomes*) kebijakan publik. Kebijakan publik besar dampaknya dan akan sangat menentukan, apakah perempuan (dan anak) dapat mengakses keadilan sosial dan keadilan hukum. Telah terbukti bahwa kebijakan publik yang tidak memperhitungkan pengalaman perempuan, berdampak pada keseluruhan kualitas pembangunan manusia. Hal ini tercermin dari rendahnya tingkat indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia yang hanya mencapai 107 dari 177 negara pada tahun 2008⁵.

Program legislasi nasional yang tanggap gender, sesungguhnya adalah intisari perjuangan para perempuan anggota parlemen di tengah menumpuknya masalah yang dihadapi perempuan Indonesia. Hal ini juga dimaknai oleh salah satu responden:

“Satu-satunya cara, diselesaikan di Senayan. Sebab untuk advokasi, diskusi LSM bertahun-tahun pun juga belum memecahkan persoalan ini”⁶.

Dalam berbagai kendala internal maupun eksternal, perempuan anggota parlemen terus melakukan pekerjaan legislasi yang tanggap gender. Selain itu hal yang penting juga untuk dipahami para anggota dewan adalah kesepakatan bersama negara-negara berkembang di bidang tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals = MDG's)⁷ yang harus tercapai pada tahun 2015. Target MDG's 2015 adalah sbb⁸:

⁵ Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, M.A. dan Dra. Titiek Kartika Hendrastiti, M.A. *Buku Panduan tentang Gender di Parlemen*, Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI dan UNDP, 2010, hal.8

⁶ Adriana Venny, *Ada Untuk Membawa Perubahan* (dalam wawancara dengan salah seorang perempuan anggota DPR RI periode 2004-2009, dalam FGD tanggal, 28 Oktober 2009), Jakarta; 2010, hal: 27

⁷ Tujuan Pembangunan Milenium/Millennium Development Goals (MDGs) adalah agenda yang ambisus dalam rangka mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kehidupan, dimana para pemimpin dunia menyetujuinya dalam Sidang Millenium pada bulan September 2000 dan Indonesia termasuk salah satu dari 189 negara yang menandatangani Deklarasi ini. Tujuan dan target MDGs diharapkan tercapai tahun 2015,

⁸ Kompas, 7 Agustus 2009

1. Menghapuskan kemiskinan dan kelaparan;
2. Mewujudkan pendidikan dasar bagi anak perempuan dan anak laki-laki;
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
4. Mengurangi angka kematian anak, dan balita (di bawah lima tahun);
5. Meningkatkan kesehatan ibu;
6. Menghentikan dan mengurangi laju penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit infeksi lain;
7. Menjamin keberlanjutan lingkungan, antara lain dengan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan, mengurangi kerusakan sumberdaya alam, dan penyediaan air bersih;
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan, termasuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik, menuntaskan utang, bekerjasama dengan perusahaan farmasi untuk menyediakan obat-obat murah.

C. Perempuan Anggota Legislatif dan Penyusunan Anggaran Berspektif Gender

Berbagai hasil penelitian menggaris bawahi bahwa peran serta aktif anggota DPR perempuan dalam pembahasan maupun perumusan terkait anggaran, ”masih lemah”⁹.

Sebagai contohnya lemahnya posisi tawar perempuan di parlemen; hasil penelitian Lp3ES Jakarta Tahun 2005, antara lain menyebutkan bahwa 56 % responden mengatakan bahwa tingkat partisipasi anggota DPR RI, khususnya perempuan, ”belum sesuai harapan masyarakat pemilihnya”, hanya 28 % yang mengatakan tingkat partisipasi anggota DPR RI ”sudah sesuai harapan masyarakat”¹⁰.

Konsep penganggaran berbais gender dikenal dengan konsep Gender Responsif Budgeting (GRB). Manifestasi GRB di Indonesia ada dalam konteks Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan, di mana strateginya telah dicanangkan melalui Inpres No. 9 Tahun 2000 dan Kepmendagri No. 132 Tahun 2003. Di dalam siklus perencanaan pembangunan berperspektif gender tersebut dilengkapi dengan analisis gender yang akan menghasilkan daftar kebutuhan dari kelompok masyarakat yang menjadi dasar penyusunan alokasi anggaran negara (lebih detail baca Rukmini, 2006: 61-87)¹¹. Bagi anggota DPR, GRB adalah peluang

⁹ Lihat Laporan Hasil Penelitian, P3DI DPR RI, 2006

¹⁰ Laporan Hasil Penelitian LP3ES, ”Mengukur Tingkat Kinerja Parlemen”, 2005

¹¹ Lebih detail baca Rukmini, 2006:, hal. 61-87 Rukmini, Mimin (ed), 2006, Modul Pelatihan: *Advokasi Penganggaran Berbasis Kinerja Responsif Gender*, Jakarta, Pattiro bekerjasama dengan The Asia Foundation dan Kedubes Canada.

dalam pengawasan perencanaan, misalnya mencermati alokasi anggaran, kemudian merubah, menghapus atau merealokasi anggaran agar sesuai dengan kebutuhan konstituen.

Anggaran yang responsif gender sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan Indonesia, mengingat saat inipun tingkat *Gender Gap Development Index* Indonesia¹² masih lebih rendah dibanding beberapa rekan negara lain di Asia. Hal ini dikarenakan antara lain karena rendahnya tingkat pendidikan perempuan, partisipasi dan peluang ekonomi perempuan, kesehatan perempuan dan pemberdayaan politik. Karenanya pemerintah membutuhkan dana yang memadai guna memberdayakan perempuan, termasuk salah satunya adalah untuk membuat program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan. Dan hal tersebut harus didorong dalam lingkaran pembuatan kebijakan anggaran.

Anggaran gender terdiri dari tiga jenis yaitu yang bersifat *affirmative action*, kesetaraan dan pengarusutamaan gender. Dalam implementasinya, yang dibutuhkan oleh perempuan adalah kesejahteraan bagi masyarakat perempuan, akses, partisipasi aktif, dan kontrol gender.

Bagaimana anggaran gender bisa dijalankan yaitu dengan memenuhi lima persyaratan. Pertama, harus ada pemahaman tentang pengarusutamaan gender, kedua harus memahami payung-payung hukum berkaitan dengan isu tersebut, ketiga adalah pemahaman gender itu sendiri, keempat menemukan apa saja isu gender yang ada dalam segala sektor kehidupan masyarakat Riau, dan kelima untuk mengetahui isu gender tersebut harus ada data terpilah dalam survei yaitu data yang berbeda antara lelaki dan perempuan.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 . Disain Penelitian

Walaupun lebih bertumpu pada metode penelitian kuantitatif (*quantitative research*), penelitian ini pun mencoba memadukan antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif (penelusuran lapangan,- *diluar wawancara yang terstruktur/kuesioner*). Penggunaan dua metode penelitian ini dilakukan untuk lebih menggali data primer (tujuan utama penelitian) mengenai temuan-temuan lapangan seputar partisipasi kaum perempuan di parlemen dalam proses penyusunan anggaran yang sensitive gender secara lebih mendalam akurat dan komprehensif berikut nuansa-nuansa kualitatif yang tidak mudah ditangkap dengan pendekatan kuantitatif.

¹² The Global Gender Gap Index 2009 meletakkan Indonesia dalam peringkat 93 dari 134 negara, disebabkan antara lain tingkat partisipasi dan peluang perempuan di bidang ekonomi yang masih rendah.

3.2. Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada para perempuan anggota DPRD Provinsi Riau (10 orang) periode 2009 – 2014, dari berbagai komisi maupun partai politik. Penelitian ini khusus menyoroti tentang kiprah perempuan anggota legislatif di DPRD Provinsi Riau, khususnya dalam proses legislasi dan budgeting.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah gabungan antara pendekatan kuantitatif dengan kualitatif, berdasarkan sifatnya, penelitian ini lebih berat ke jenis penelitian kuantitatif hanya saja sampel penelitiannya sama dengan populasi, sehingga kaidah-kaidah statistik menjadi tidak dominan untuk dimasukkan. Sumber data akan digali melalui wawancara langsung dengan responden/informan, yakni para perempuan anggota DPRD Provinsi Riau, Periode 2009 – 2014.

1.5. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Perempuan Provinsi Riau Periode 2009 – 2014, sebanyak 10 orang (tercatat di Komisi A 1 orang, Komisi B 2 orang, Komisi C 2 orang, Komisi D 4 orang, dan 1 orang Wakil Ketua DPRD).

Sampel dalam penelitian ini seluruh (10 orang) perempuan anggota DPR Provinsi Riau.

Berikut adalah jumlah responden/informan penelitian dan asal partai pengusung:

Tabel III.1
Responden/Informan Penelitian

No	Nama Anggota Dewan Perempuan	Jabatan / Komisi	Partai
1	Alminis, S.Pd	Wakil Ketua DPRD Riau	PDI-P
2	Elly Suryani, SH	Sekretaris Komisi A	Golkar
3	Dra. Sumiyanti, M.Si	Anggota Komisi B	Golkar
4	Dra. Rosvalnida Zulher (Sedang menempuh jenjang S2)	Anggota Komisi B	Golkar
5	Lampita Pakpahan (Sedang menempuh jenjang S1)	Anggota Komisi B	Demokrat
6	Rita Zahara (sedang menempuh jenjang S1)	-Anggota Komisi C -Ketua Fraksi	Demokrat
7	Hj. Supriati (Sedang menempuh jenjang S1)	Sekretaris Komisi D	Golkar
8	Dra. Iwa Sirwani Bibra	-Anggota Komisi D -Ketua Fraksi	Golkar
9	Hj. Mukhniarti, SE	Anggota Komisi D	Demokrat
10	Dra. Hj. T. Nazlah Khairati, M.Pd.	Anggota Komisi C	PPP

Catatan :

1. Komisi A : Bidang Pemerintahan dan Hukum

2. Komisi B : Bidang Ekonomi dan Keuangan
3. Komisi C : Bidang Pembangunan
4. Komisi D : Bidang Kesejahteraan Rakyat, termasuk Pendidikan

Sumber: Diolah dari berbagai sumber data di DPRD Riau

3.6. Teknik Pengumpulan Data dan Analisa Data

Data lapangan akan digali melalui tatap muka langsung dengan responden penelitian (10 orang perempuan anggota DPRD Riau Periode 2009 – 2014) dengan cara jemput bola, artinya interviewer (tim lapangan) yang harus pro aktif menemui dan mencari nara sumber. Data hasil penelitian lapangan diolah dengan bantuan program *Statistical Package for Socials Sciencis* (SPSS) versi 15.

Pengumpulan data primer (proses data collecting) dilakukan melalui wawancara tatap muka (*face to face interview*) dengan bantuan panduan wawancara terstruktur (*questioner*). Data primer ini (hasil survai) akan diperkuat dengan data sekunder yang diperoleh dengan penelusuran dokumen, seperti hasil laporan survai/penelitian, buku, terbitan berkala (survei, majalah dan jurnal).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Demografi Responden

Berdasarkan hasil penelitian, lebih dari separuh (70,0 %) anggota DPRD perempuan Riau Periode 2009 – 2014 berpendidikan S-1, sementara itu sisanya 30.0 % berpendidikan S-2. Artinya, fakta ini semakin menguatkan bahwa sebenarnya dari sisi pendidikan sangat memadai, akan tetapi kenapa kinerja anggota DPRD Riau secara umum masih lemah. Hal ini jelas belum samanya persepsi seluruh anggota DPRD Riau dalam memandang kepentingan perempuan, disamping penyebab lainnya, seperti komitmen politik, sarana dan prasarana yang kurang menunjang, rasa tanggungjawab dan motif awal ketika mencalonkan diri sebagai anggota DPRD.

4.2 Eksplorasi Pertanyaan

4.2.1 Tingkat Pengetahuan Awal Anggota DPRD Riau Terhadap Tupoksi Sebagai Dewan

Berdasarkan hasil penelitian, ternyata lebih dari separuh (70,8 %) anggota DPRD Riau perempuan ”secara umum mengetahui tugas pokok dan fungsi dewan”, sementara sisanya 29,2 % mengaku ”kurang begitu tahu tugas pokok, fungsi dan wewenang seorang dewan”. Diantaranya, sebanyak 56.0 % ”megetahui tugas pokok dan fungsi dewan secara detail setelah

jadi dewan”, sementara yang sudah memahami sejak awal (sebelum jadi dewan) sebanyak 24,2 % dan sisanya 20,8 %, mengaku ”sampai saat ini kurang begitu memahami apa yang menjadi tugas pokok seorang dewan”. Artinya ketika pencalonan, mereka tidak mempersiapkan tugas utama seorang dewan, yang ada dalam benak mereka adalah bagaimana agar terpilih menjadi wakil rakyat. Jarang yang mempersiapkan sejak awal, oleh karena itu, sudah dapat diduga bagaimana kualitas anggota dewan jika tupoksi dewan saja baru tahu secara detail setelah jadi dewan.

4.2.2 Pengakuan Anggota Dewan Perempuan di DPRD Riau Dalam Menjalankan Tugasnya

Berdasarkan hasil penelitian, ternyata hampir seluruh anggota dewan (89.0 %) selalu dilibatkan dalam setiap pembahasan terkait tugas pokok dewan, sementara sisanya 11.0 % mengaku ”kadang-kadang dilibatkan, kadang-kadang tidak”.

Ketika dihadapkan pada pertanyaan, dalam rangka melaksanakan tupoksi dewan, pembahasan bidang apa yang dirasakan paling sulit (alot) pembahasannya? Ternyata lebih dari separuh (56.3 %) anggota dewan mengaku ”sulit” ketika membahas tupoksi dewan (legislasi, anggaran dan pengawasan) karena minimnya pengetahuan akan masalah yang dibahas. Sementara itu sebanyak 25.6 %, mengaku ”sulit” ketika membahas soal anggaran, dan sebanyak 18.1 % sisanya, mengaku ”sulit” ketika membahas soal ”pengawasannya”.

4.2.3 Tingkat Partisipasi Perempuan Anggota DPRD Riau Dalam Membahas Anggaran Yang Terkait Kepentingan Perempuan

Berdasarkan hasil penelitian, ternyata produk anggota dewan (Perda) yang terkait perlindungan dan kepentingan perempuan di Riau masih jauh dari harapan, hal ini terbukti dengan pengakuan mereka (89.1 %) yang mengatakan bahwa selama ini ”*belum ada*” Perda yang terkait, *langsung*, dengan kepentingan perempuan. Artinya bisa saja ke depan ada Perda yang terkait langsung dengan kepentingan perempuan, mengingat penelitian ini dilakukan masa jabatan anggota DPRD Riau baru 2 tahun jalan. Gagasan maupun pemikiran tentang rancangan perda yang terkait langsung kepentingan perempuan selalu ada dan dibahas, akan tetapi belum pernah ada yang terealisasi, selalu mentah pada tingkat pembahasan di paripurna. Perda-perda yang diusulkan dan telah dibahas pada tingkat paripurna, selalu terganjal di Kementerian Dalam Negeri, karena Perda yang dihasilkan bertentangan dengan Perda sebelumnya atau bertentangan

dengan Undang Undang di atasnya. Sementara sisanya 10.9 % mengaku ”tidak ada” lebih pesimis akan lahirnya Perda yang terkait langsung dengan kepentingan perempuan. Hal ini disebabkan, minimnya anggota dewan perempuan di DPRD Riau (64.5 %) oleh karena itu harus diperbanyak sesuai UU yang mengharuskan komposisi jumlah anggota DPRD minimal 30 %, sementara itu sisanya mengakui ”minimnya komitmen (kepedulian) terhadap kepentingan perempuan, oleh karena itu perlu disosialisasikan akan pentingnya persepsi antara anggota dewan laki-laki dengan perempuan.

Berdasarkan pengakuan para anggota dewan perempuan di DPRD Riau Periode 2009 – 2014 dan dokumen pada Bagian Perundang-undangan, selama ini DPRD Riau telah mensyahkan 3 PERDA (tidak terkait langsung dengan kebutuhan perempuan) sebagai kinerja anggota dewan. Perda –perda tersebut adalah :

PERDA Tahun 2009:

1. PERDA No 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat
2. PERDA No. 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Riau pada Pihak Ketiga

PERDA Tahun 2010 :

1. Perda No. 2 Tahun 2010, tentang Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau.
2. Perda No. 3 Tahun 2010, tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Riau
3. Perda No. 4 Tahun 2010, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009.

Perda-perda inilah yang sudah dihasilkan anggota DPRD Riau Periode 2009 – 2014, selama menjabat baru 2 tahun terakhir ini.

Berdasarkan pengakuan tersebut di atas, sampai saat ini memang belum satupun Perda yang dihasilkan terkait langsung dengan program kegiatan bagi kaum perempuan di Riau. Padahal nasib kaum perempuan di Indonesia, -tidak terkecuali di Riau, selalu ternafikan alias terpinggirkan, baik dalam proses pembangunan, maupun pemberdayaan ekonomi kaum perempuan.

Ketika ditanya sikap atau respon mengenai belum adanya Perda yang terkait langsung dengan kepentingan perempuan, *berdasarkan hasil penelitian*, ternyata para pendekar Riau ini seluruhnya (100.0 %) akan tetap memperjuangkan hak-hak atau kepentingan perempuan seperti perlunya Perda tentang Perlindungan Saksi dan Korban Kekerasan Sex maupun Fisik Bagi

Perempuan” di Riau serta pentingnya Perda terkait Hak-hak Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan bagi Perempuan dan Ibu Menyusui di Riau. Ketika memperjuangkan Perda-perda tadi, mereka mengaku terkendala ”minimnya suara perempuan di DPRD Riau” (90,0 %), sementara sisanya mengaku ”kurangnya dukungan dari anggota DPRD laki-laki (10,0 %) ketika membahas isu terkait kepentingan kaum perempuan.

Ketidakadaan Perda-perda tadi, berimplikasi kepada minimnya anggaran untuk kegiatan terkait kepentingan kaum perempuan. Hal ini diakui oleh 80,7 % anggota DPRD Perempuan di Riau, meski begitu, mereka akan tetap berusaha memperjuangkan kepentingan kaum perempuan di Riau. Praktis perjuangan mereka selama ini, hanya sampai pada tingkat Badan Musyawarah (Bamus), ketika dibawa ke tingkat paripurna untuk di sah kan, suara perempuan hilang seperti di telan ombak. Kendala inilah yang seringkali dihadapi oleh kaum perempuan di DPRD Riau. Sementara itu sisanya, 20,3 %, beranggapan bahwa kendala tersebut karena minimnya anggota DPRD perempuan di Riau.

Untuk itu, mereka (para pendekar perempuan di DPRD Riau), 48,3 % menyarankan agar ke depan anggota perempuan di DPRD Riau ”harus lebih berani memperjuangkan hak-hak perempuan”, sebanyak 33,5 % menyarankan agar jumlah anggota perempuan di DPRD Riau perlu ditambah dan sisanya 18,2 %, menyarankan agar perempuan yang menjadi anggota DPRD Riau harus lebih menguasai tugas pokok, kewenangan dan fungsi dewan, terutama soal anggaran yang terkait kepentingan perempuan. Untuk lebih jelasnya, diagram-diagram berikut menyajikan persoalan tadi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian seperti telah diuraikan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Kurangnya pemahaman para anggota dewan perempuan di Riau dalam menjalankan tugas pokok, wewenang dan fungsinya sebagai anggota dewan.
2. Tingkat partisipasi anggota perempuan di DPRD Riau Periode 2009 – 2014, berperspektif gender, ”sangat rendah”, sehingga tidak mengherankan jika selama ini eksistensi perempuan di Riau cenderung monoton alias tidak berkembang.

3. Kurangnya interaksi antara wakil rakyat dengan konstituennya, sehingga aspirasi arus bawah tidak terserap secara maksimal, padahal setiap kali "turba" atau turun ke bawah ketika masa reses, selalu dibiayai oleh uang rakyat.

5.2. Saran

Dalam rangka meningkatkan kualitas maupun kuantitas perempuan di parlemen, beberapa masukan untuk Memperkuat Partisipasi Legislasi Perempuan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan politik dan peningkatan kapasitas berperspektif gender.
2. Perempuan perlu aktif dan masuk dalam struktur partai.
3. Belajar terus dan bekerja keras.
4. Mengasah kemampuan berbicara di depan publik.
5. Menjalin hubungan baik, lobi, dan rajin bertanya.
6. Penguatan perempuan Parlemen, sehingga ada iklim dan lingkungan yang memungkinkan perempuan melindungi diri sendiri dan menggunakan hukum sebagai penjamin hak-haknya.
7. Menciptakan kontrak sosial baru melalui kerangka hukum dan institusi yang mempromosikan standar kelembagaan baru di mana prinsip representasi perempuan diakui.
8. Demi menjamin Hak Asasi Perempuan, parlemen perlu berkomitmen merevisi mekanisme lama yang bertentangan, dan menciptakan mekanisme baru untuk melindungi hak yang belum tercakup dalam instrumen hukum negara;
9. Menciptakan instrumen yang ramah terhadap keterlibatan perempuan dalam proses politik;
10. Melibatkan aktor non-negara, di lingkungan rumah dan komunitas dalam upaya menghapus segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Pendidikan politik dan peningkatan kapasitas berperspektif gender.
11. Berjejaring dengan kelompok di luar parlemen: gerakan perempuan, dll.
12. Menjalin relasi dengan media.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, Venny, *Ada Untuk Membawa Perubahan*, UNDP Indonesia, Jakarta; 2010
- Boby, Max, *DPR RI dalam Perspektif Sejarah dan Tata Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994
- Budlender, Debbie and Maria Isabel T.Buenaobra, 2001, "Gender in the Budget of Local Government Unity", in Gender Budget Trail: the Philippine experience, Debbie Budlender, Asia Foundation
- Budlender, Debbie, 2006, *The Gender Responsive Budgeting*, UNIFeM, www.gender-budgets.org
- Byman, Alan, "Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Pemikiran Lebih Lanjut tentang Penggabungannya" dalam Julia Brannen (ed.), *Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Cet. IV, Pustaka Pelajar bekerjasama dengan IAIN Antarasi, Yogyakarta, 2002
- David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik*, Jakarta : LP3ES
- Easton, David, *A System of Political Life*, New York : John Willey and Son Inc. 1965
- Hammersley, Martyn, "Dekonstruksi Pemisahan Paradigma Kualitatif dan Kuantitatif," dalam Julia Brannen ed., *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 1997
- Imawan, Riswanda *Faktor-faktor yang Menghambat Usaha Optimasi Peran Dewan Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia*, dalam Meriam Budiaerjo, Ibrahim Ambong, *Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993
- Irianto, Sulistyowati, Titiek Kartika Hendrastiti, *Buku Panduan tentang Gender di Parlemen*, Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI dan UNDP, 2010
- Kansil, CS.T. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, 1990
- Kompas, Edisi 7 Agustus 2009
- Kompas, Edisi 27 Januari 2009
- Laporan Hasil Penelitian LP3ES, "Mengukur Tingkat Kinerja Parlemen", 2005
- Lestari, Sri and Albertus Henry, 2001, "Gender Budget sebagai Analisis Pembangunan", Jurnal Perempuan, No.19, 2001, Jakarta
- Lymens, Tower Sargen, *Ideologi Politik Kontemporer*, Jakarta:Bina Aksara, 1996
- Rukmini, Mimin (ed), 2006, Modul Pelatihan: *Advokasi Penganggaran Berbasis Kinerja Responsif Gender*, Jakarta, Pattiro bekerjasama dengan The Asia Foundation dan Kedubes Canada.

- Sanit, Arbi, *Perwakilan Politik; Suatu Studi Awal dalam Pencarian Analisa Sistem Perwakilan Politik di Indonesia*, Jurnal Ilmu dan Budaya, Edisi 2 Tahun V, Jakarta: Universitas Nasional, 1992
- Sanit, Arbi, *DPR dan Kontrol Politik*, Makalah Seminar, Hotel Aryaduta Jakarta, 2007
- Sekretaris Jendral DPR RI, *Peraturan Tata Tertib DPR RI*, Jakarta: 1997
- Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Alfabeta, Jakarta, 2000
- Sukarna, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1981
- Sumargo, Bagus, Makalah “*Metoda Penelitian*”, disampaikan pada Pelatihan Metodologi Riset LP3ES, 1999
- Syafrin, Harianti, *Menyambung Suara daerah*, Institute for Strategic And Development Studies (ISDS), 2008
- UUD 1945, pasal 20, pasal 20 A, pasal 21, pasal 22.
- Vreede, Cora -De Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian*, Komunitas Bambu, Depok: 2008